

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Serangan militer Rusia ke Ukraina yang dimulai pukul 00.05 pada 24 Februari 2022 hingga saat skripsi ini disusun telah menimbulkan dampak tidak hanya bagi kedua negara secara langsung, tetapi juga bagi negara lainnya di benua Eropa, tak terkecuali Inggris. Bagi sebagian besar negara-negara di Eropa, kontak senjata Rusia-Ukraina secara terbuka telah menjadi ancaman serius terhadap stabilitas keamanan mereka. Terlebih, Rusia dengan hegemoni dan kekuatan yang dimilikinya dipandang sebagai ancaman keamanan terbesar di kawasan Eropa sejak berakhirnya Perang Dunia ke-II. Setiap negara memiliki tingkat ancaman yang berbeda-beda. Seperti dikemukakan Jack C. Plano dan Roy Olton dalam Mahfud Massaguni, dkk (2017) ancaman yang dapat membahayakan kepentingan nasional seperti ancaman terhadap warga negara, integritas wilayah, ataupun ideologi sebuah negara, menjadikan keamanan (*security*) sebagai sebuah hal utama dalam kebijakan nasional. Negara sebagai sebuah aktor utama dalam hubungan internasional, perlu memperkuat keamanan demi kedaulatan dan independensi negara tersebut.

Selain ancaman keamanan, dampak yang paling nyata dari konflik bersenjata antara Rusia dengan Ukraina adalah terganggunya pasokan pangan dari Ukraina yang dikenal sebagai lumbung gandum dan biji-bijian bagi Eropa bahkan dunia. Ukraina memiliki peran penting dalam memasok pasar dunia sebagai pengekspor minyak bunga matahari terbesar, pengekspor jagung terbesar keempat dan pengekspor gandum terbesar kelima. PBB melalui sekretaris Jenderal Antonio Guterres pada forum resmi yang digelar pada Mei 2022

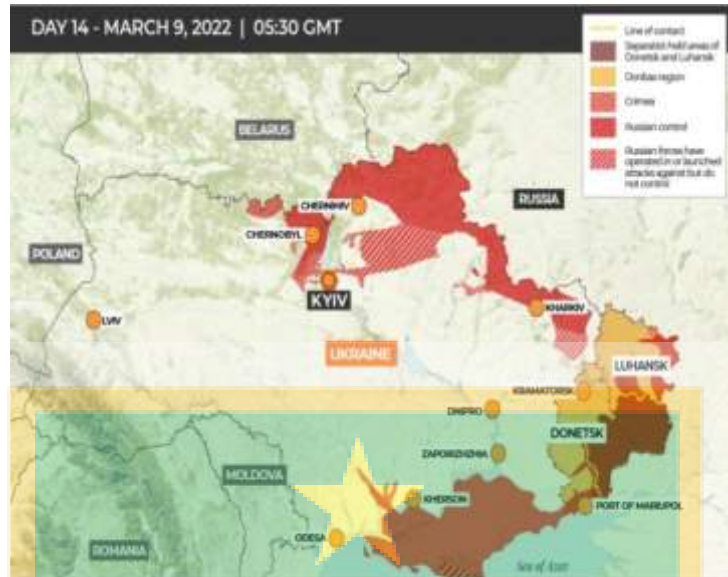
mengatakan, sekitar 20 juta ton biji-bijian tertahan di Ukraina dari panen sebelumnya.¹ PBB juga menyampaikan peringatan bahwa terganggunya produksi komoditas pertanian di Ukraina dapat memicu terjadinya krisis pangan bukan hanya di benua Eropa, tapi merambah secara global.²

Dampak berikutnya yang ditimbulkan dari konflik senjata antara Rusia dan Ukraina adalah terganggunya ketersediaan dan stabilitas harga energi yang melanda sebagian besar Eropa bahkan dunia. Implikasi serius yang ditimbulkan itu karena Rusia merupakan produsen dan pengeksportir minyak terbesar ketiga di dunia, pengeksportir gas alam terbesar kedua, dan pengeksportir minyak terbesar batubara terbesar ketiga dunia.³ Serangan militer Ukraina juga secara substansial meningkatkan risiko gangguan dalam perdagangan pupuk global karena Rusia merupakan eksportir pupuk terbesar dunia. Rusia bersama Tiongkok, Kanada dan AS dikenal sebagai penyuplai pupuk dunia, Indonesia bahkan termasuk salah satu negara yang mengimpor pupuk dari Rusia. Berdasarkan data Organisasi Pangan dan Pertanian atau Food and Agriculture Organization (FAO) Perserikatan Bangsa-Bangsa, pada 2021 Rusia menjadi eksportir pupuk nitrogen terbesar di dunia, peringkat kedua dunia sebagai produsen pupuk potash, dan peringkat ketiga terbesar dunia untuk pupuk fosfor. Konflik senjata yang terus berkecamuk antara Rusia dengan Ukraina telah berdampak serius terhadap rantai pasok pangan dunia, apalagi selain sebagai produsen pupuk, Rusia juga merupakan produsen sereal dan gandum terkemuka di dunia, serta sejumlah komoditas penting lainnya.

¹ BBC New.2022. Ukraine invasion could cause global food crisis, UN warns. <https://www.bbc.com/news/world-europe-61503049> diakses pada 09 Maret 2023

² BBC New.2022. Ukraine invasion could cause global food crisis, UN warns. <https://www.bbc.com/news/world-europe-61503049> diakses pada 09 Maret 2023

³ Connie Rahakundini Bakrie, Mariane Olivia Delanova, Yanyan M Yani. (2022). Pengaruh Perang Rusia Dan Ukraina Terhadap Perekonomian Negara Kawasan Asia Tenggara. Jurnal Caraka Prabu Vol.6 (1) Juni 2022. Hal. 65



Gambar 1 : Peta sebaran pasukan tentara Rusia di Ukraina
Sumber : Al Jazeera

Tidak hanya berdampak terhadap ekonomi, konflik senjata antara Rusia dan Ukraina juga terus menelan korban jiwa. Data yang dirilis PBB menyebutkan, memasuki bulan ke-7 konflik senjata antara Rusia dengan Ukraina telah menelan korban jiwa 14.059 korban sipil, dengan rincian 5.767 orang tewas dan 8.292 terluka. (PBB, 2022). Bahkan PBB memprediksi korban di kalangan sipil maupun militer jauh lebih tinggi dari data yang telah berhasil mereka konfirmasi.⁴ Jumlah korban akibat serangan bersenjata berskala besar oleh Rusia tersebut terus mengalami kenaikan. Satu tahun kemudian Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia (OHCHR) melaporkan bahwa jumlah korban meningkat hingga 12 persen. Jumlah korban tewas bertambah menjadi 8.006 orang,

⁴ Korban konflik senjata antara Ukraina dan Rusia sebagian besar adalah warga sipil khususnya anak-anak. PBB memprediksi data korban yang berjatuh akibat invasi Rusia ke Ukraina yang dilaporkan jauh lebih kecil dibanding dengan angka yang terjadi sebenarnya seperti dirilis PBB 10 Oktober 2022 dalam link : <https://news.un.org/en/story/2022/09/1126391>

sementara korban luka-luka mencapai 13.287 orang. Jumlah korban terus meningkat hingga 7 Mei 2023 tercatat 23.606 korban sipil Ukraina, dari jumlah tersebut 8.791 di antaranya tewas dan 14.815 mengalami luka-luka. OHCHR juga meyakini angka tersebut besar kemungkinan akan jauh lebih besar lagi, karena banyak laporan di wilayah konflik masih tertunda dan beberapa di antaranya masih menunggu pembuktian. Penambahan jumlah korban dipastikan lebih tinggi karena berbagai pelanggaran hukum humaniter terhadap warga sipil Ukraina masih terus berlangsung.⁵

Konflik senjata memicu gelombang besar-besaran pengungsi dari Ukraina menuju negara-negara sekitar Eropa. Menurut data Organisasi Internasional untuk Migrasi (IOM) PBB hingga Oktober 2022 terdapat sekitar 8 juta warga Ukraina meninggalkan negaranya demi mencari tempat perlindungan yang aman. Para pengungsi dari Ukraina 90% adalah perempuan dan anak-anak. Mereka sebagian besar melarikan diri ke negara tetangga terutama ke Polandia, tetapi banyak yang mencari keselamatan di Hungaria, Republik Moldova, Rumania, Slovakia, dan negara-negara lain di wilayah tersebut.⁶ Dari populasi pengungsi, sebagian besar terus berlanjut ke negara-negara Eropa lainnya. Pasukan militer

⁵ OHCHR meyakini angka tersebut besar kemungkinan jauh lebih besar lagi karena berbagai pelanggaran hukum humaniter terhadap warga sipil Ukraina masih terus berlangsung diakses melalui link <https://www.ohchr.org/en/news/2023/05/ukraine-civilian-casualty-update-8-may-2023#:~:text=From%2024%20February%202022%2C%20which,8%2C791%20killed%20and%2014%2C815%20injured.>

⁶ UNHCR dalam Korban konflik senjata antara Ukraina dan Rusia sebagian besar adalah warga sipil khususnya anak-anak. PBB memprediksi data korban yang berjatuh akibat invasi Rusia ke Ukraina yang dilaporkan jauh lebih kecil dibanding dengan angka yang terjadi sebenarnya seperti dirilis PBB 10 Oktober 2022 dalam link : <https://news.un.org/en/story/2022/09/1126391>

⁶ OHCHR meyakini angka tersebut besar kemungkinan jauh lebih besar lagi karena berbagai pelanggaran hukum humaniter terhadap warga sipil Ukraina masih terus berlangsung diakses melalui link <https://www.ohchr.org/en/news/2023/05/ukraine-civilian-casualty-update-8-may-2023#:~:text=From%2024%20February%202022%2C%20which,8%2C791%20killed%20and%2014%2C815%20injured.>

HLnya menyebutkan para pengungsi dari Ukraina menyebar di seluruh Eropa lebih dari 7 juta orang <https://reporting.unhcr.org/operational/situations/ukraine-situation>

Rusia terus melakukan serangan militer di berbagai wilayah Ukraina, tak terkecuali Ibu Kota Negara, Kyiv. Di dalam negeri Ukraina sendiri, terdapat 5.914.000 warga negara tersebut tinggal di pengungsian.

Situasi yang ditimbulkan oleh serangan militer Rusia ke Ukraina kemudian menjadikan Inggris turun tangan untuk mencari upaya resolusi konflik Rusia-Ukraina. Di antara negara-negara yang berada di benua Eropa, Inggris dikenal sebagai salah satu negara yang sangat aktif dalam merespons serangan militer Rusia ke Ukraina. Sebagai salah satu negara dengan kekuatan ekonomi terbesar di dunia, Inggris berkepentingan agar stabilitas keamanan kawasan maupun dunia tetap terjaga. Inggris memilih untuk menempuh diplomasi dengan tekanan atau populer disebut sebagai Diplomasi Koersif. Diplomasi Koersif Inggris terhadap Rusia bertujuan untuk menciptakan situasi damai *peace making* dengan ditandai kesediaan Rusia menghentikan agresi dan mencari solusi damai melalui dialog dan negosiasi. Instrumen kebijakan politik luar negeri dengan cara koersif ini dipandang perlu oleh Inggris karena konflik Rusia-Ukraina yang terus berdampak luas secara geopolitik maupun global.

Langkah Diplomasi Koersif Inggris dapat dilihat dari sepak terjang negara tersebut melalui kebijakan-kebijakannya selama masa pemerintahan Perdana Menteri Boris Johnson ditandai dengan penjatuhan berbagai sanksi, penyitaan aset-aset Rusia, penarikan kembali warganya, pemutusan hubungan bisnis dengan Rusia, dan berbagai bentuk *pressure* lainnya. Dalam menjalankan praktik Diplomasi Koersif-nya, Inggris tidak sendiri, Inggris menggunakan kekuatan militernya secara terbatas dengan beraliansi bersama NATO agar Rusia mematuhi permintaanya untuk menghentikan serangan militer terhadap Ukraina.

Interaksi dalam sistem politik internasional yang diwarnai konflik sebagaimana dapat dianalisa dalam konflik Rusia melawan Ukraina yang melibat intervensi aktor lain seperti Inggris dan negara-negara sekutunya, sejalan dengan perspektif Realisme dan Neorealisme. Dalam perspektif ini konflik dalam sistem politik internasional merupakan peristiwa yang berulang-ulang karena sifat dari sistem politik internasional yang anarkis sebagaimana diyakini oleh perspektif Realisme sehingga kerja sama diperlukan antar negara hanya untuk kepentingan nasional masing-masing aktor sebagaimana perspektif Neo Realisme memandang hal ini.

Inggris demi melindungi kepentingan nasionalnya dan mempertahankan geopolitik di kawasan Eropa melakukan diplomasi dengan tekanan atau dikenal dengan istilah Diplomasi Koersif terhadap Rusia. Di antara reaksi yang ditunjukkan negara-negara Eropa atas serangan militer yang dilakukan Rusia terhadap Ukraina, penulis tertarik untuk mendalami kebijakan politik luar negeri Inggris, khususnya selama kepemimpinan Boris Johnson. Kebijakan politik luar negeri Inggris yang dijalankan melalui Diplomasi Koersif dilakukan Inggris selama kepemimpinan Perdana Menteri Boris Johnson hingga ia mengundurkan diri sebagai Perdana Menteri Inggris pada Kamis, 7 Juli 2022. Sementara, Boris Johnson meninggalkan Downing Street No. 10, London, sebagai tanda berakhirnya masa kepemimpinan dirinya sebagai Kepala Pemerintahan Inggris, pasukan militer Rusia masih tetap melakukan serangan militer di Ukraina tanpa menghiraukan berbagai tekanan yang diberikan Inggris dan negara-negara sekutunya. Peristiwa inilah yang menjadi latar belakang bagi penulis untuk memilih topik “Diplomasi Koersif Inggris Masa Perdana Menteri Boris Johnson Terhadap Rusia Sebagai Upaya Resolusi Konflik Rusia-Ukraina” sebagai bahan penelitian skripsi. Penelitian ini menurut hemat penulis penting, karena

serangan militer Rusia terhadap Ukraina merupakan kajian populer di kalangan penstudi Ilmu Hubungan Internasional, aktor hubungan internasional, akademisi, pemerhati ekonomi politik internasional, dan para *stakeholder* lainnya.

Terdapat beberapa peneliti sebelumnya yang membahas mengenai upaya penyelesaian konflik Rusia-Ukraina. Beberapa penelitian terdahulu yang menjadi bagian dari literatur penulis dalam penelitian ini antara lain tulisan Syuryansyah dan Rethorika Berthanila berjudul *Penyelesaian Konflik Rusia-Ukraina* yang dipublikasikan dalam Jurnal Power in International Relations (PIR), 2022 yang lebih menyoroti penyelesaian konflik Rusia dan Ukraina melalui empat cara yaitu negosiasi, *good offices*, organisasi internasional, dan mediasi. Menurut keduanya, keempat upaya ini dapat dijadikan alternatif untuk mengakhiri konflik Rusia-Ukraina.

Kedua, hasil penelitian ilmiah yang ditulis oleh Adib Izzuddin berjudul *Analisis Upaya Penyelesaian Konflik Rusia-Ukraina Tahun 2022*. Tulisan ini berfokus pada analisis konflik Rusia dan Ukraina di tahun 2022 dan upaya yang dilakukan dalam penyelesaian konflik terutama melalui proses negosiasi yang dilakukan oleh Turki dan Israel yang mengalami kegagalan.

Ketiga, yakni karya tulis ilmiah karya Ruth Endam dan Divine Forcha Wasum *Russian-Ukraine 2022 War: A Review of the Economic Impact of Russian-Ukraine Crisis on the USA, UK, Canada, and Europe* dipublikasikan oleh Advance in Social Science Research Journal (2022) yang lebih menitikberatkan terhadap dampak perang Rusia dan Ukraina di bidang ekonomi yang dialami Rusia bahkan juga secara global. Menurut Endam dan Wasum, diperlukan komitmen global dalam mencari upaya Resolusi Konflik Rusia-Ukraina.

Keempat adalah tulisan berjudul *Pendekatan Diplomasi Ekonomi dalam Konflik Rusia-Ukraina* yang ditulis oleh Randy Bion Bramastya dan Ranita Rompa Batan dalam Jurnal Sosial Politik Integratif (SPI) Vol. II, 2022. Dalam tulisannya tersebut kedua penulis membahas Diplomasi Ekonomi yang dilakukan Uni Eropa, Inggris, Amerika Serikat, Korea Selatan, dan Jepang. Negara-negara maju tersebut sepakat untuk melakukan semua yang dapat dilakukan guna menghentikan perang demi menjamin perdamaian. Salah satunya adalah menggunakan Diplomasi Ekonomi yang berjalan tidak efektif.

Kelima adalah tulisan berjudul *Diplomasi Indonesia dalam Konflik Rusia-Ukraina: Sebuah Kajian Tentang Soft-Power* yang ditulis oleh Dinda Tulus Tiara dan Syasya Yuania Fadila Mas'udi yang dipublikasikan dalam Jurnal Political Issue (JPI), 2023. Kedua Sarjana Hubungan Internasional ini membahas mengenai upaya Indonesia melalui Presiden Joko Widodo berinisiatif melakukan misi perdamaian dengan melakukan kunjungan ke Ukraina dan Rusia. Inisiatif itu dilakukan dengan misi untuk menjadi jembatan komunikasi kedua negara yang tengah berkonflik.

Namun demikian, temuan-temuan dari kajian literatur terdahulu belum ada yang membahas dengan spesifik tentang Diplomasi Koersif Inggris terhadap Rusia pada masa pemerintahan Perdana Menteri Boris Johnson sebagai bagian dari upaya Resolusi Konflik Rusia-Ukraina. Sehingga dengan demikian peneliti berkesimpulan telah terjadi *gap research*. Adapun kontribusi (*novelty*) penelitian ini dimaksudkan untuk mengelaborasi konsep Diplomasi Koersif yang dikemukakan oleh Alexander L. George dan (1971) yang mengemukakan tiga elemen karakteristik Diplomasi Koersif yaitu permintaan *demand*, ancaman *threat*, dan tenggat waktu *time pressure*. Dalam pandangan George, Diplomasi Koersif adalah salah satu jenis diplomasi yang mengacu pada penggunaan ancaman dengan

kekuatan terbatas atau kekuatan terbatas untuk menghentikan atau membatalkan tindakan pihak lain yang dianggap mengancam.

Pemikiran George seperti dikutip dari tulisan Ilario Schettino berjudul *Is Coercive Diplomacy is Viable means to achieve political objective?* disebutkan bahwa Diplomasi Koersif sebenarnya merupakan strategi yang menarik, karena menawarkan kemungkinan untuk mencapai tujuan politik tanpa menggunakan kekuatan militer tradisional, tanpa pertumpahan darah, serta biaya politik yang lebih sedikit. Dalam sejarah konflik internasional, Diplomasi Koersif telah terbukti efektif digunakan untuk melakukan tekanan 'koersif' dengan risiko lebih rendah terhadap negara lawan yang lebih lemah.

1.2 Rumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Interaksi antar negara dalam menjalin hubungan internasional kerap menempatkan suatu negara dengan negara lainnya berseberangan pendapat bahkan menjurus kepada konflik terbuka sehingga diperlukan adanya upaya penyelesaian agar dapat memenuhi kepentingan nasionalnya masing-masing. Untuk itulah diplomasi diperlukan untuk mencari solusi atau resolusi konflik terbaik bagi kedua belah pihak dengan melalui tekanan 'koersif' agar terhindar dari perang terbuka yang berisiko terhadap kerugian yang lebih besar.

Diplomasi Koersif sebagai salah satu jenis resolusi konflik yang kerap diambil para aktor hubungan internasional dalam realitasnya sering kali tidak terjadi ketidaksesuaian antara teori dan pelaksanaannya. Demikian pula dalam konflik antara Rusia dan Ukraina yang direspons Inggris dengan melakukan pendekatan yang berbeda dibanding negara-negara lainnya di Eropa bahkan dunia. Dalam mencermati konflik yang terjadi di benua

Eropa ini penulis mengidentifikasi sejumlah masalah antara lain :

- a. Sejarah mencatat, hubungan Diplomatik Inggris dan Rusia kerap diwarnai ketegangan seiring berbagai permasalahan. Invasi Rusia ke Ukraina memicu ketegangan meskipun kedua belah pihak memiliki hubungan perdagangan yang saling ketergantungan.⁷
- b. Inggris yang bersekutu dengan NATO turut terlibat dalam membantu militer Ukraina melawan militer Rusia menjadikan konflik terus berkepanjangan. Meski belum menerima keanggotaan Ukraina secara resmi, namun NATO memberikan dukungan terhadap Ukraina dalam melawan invasi Rusia baik dalam bentuk pelatihan militer, pasukan militer, bahkan bantuan finansial berupa anggaran untuk pembelian senjata militer sehingga konflik senjata terus berlangsung.⁸
- c. Perang pengaruh antara Barat dalam hal ini Inggris, Eropa dan AS melawan Rusia di Timur sebagai sisa dari perang dingin menjadikan konflik Rusia dan Ukraina bukan hanya konflik dua negara tetapi melibatkan negara-negara lain yang awalnya tidak berkepentingan secara langsung.⁹
- d. Berbagai langkah Resolusi Konflik demi terciptanya perdamaian baik yang diupayakan Rusia maupun Ukraina dan pihak ketiga hingga kini belum berhasil menghentikan invasi militer Rusia di Ukraina.¹⁰

⁷ Erick Donald Jacob.(2020). Dampak percobaan pembunuhan mantan mata-mata rusia terhadap hubungan bilateral inggris-rusia. Ejournal: ilmu hubungan internasional, vol. 8 (1), 2020.Hal. 124

⁸ Sita Hidriyah. (2022). Jurnal : Eskalasi ketegangan rusia-ukraina available at https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info%20Singkat-XIV-4-II-P3DI-Februari-2022-229.pdf

⁹ Dosen Studi Keamanan Internasional Program Studi Hubungan Internasional (HI) UII, Irawan Jati, S.IP., M.Hum., MSS., Ph.D (Cand.) dalam International Relations In Conversation dengan tema Russia-Ukraine Updates: What Happens Next, Kamis (24/2) petang, melalui Zoom Meeting.

¹⁰ Adib Izzuddin, Rossi Indra Kurniawan, Hastian Akbar Stiarso. (2022). Analisis Upaya Penyelesaian Konflik Rusia-Ukraina Tahun 2022. Jurnal Pena Wimaya Vol 2 (2) 2022.

- e. Inggris dalam kepemimpinan Boris Johnson memilih untuk menerapkan Diplomasi Koersif disertai tekanan melalui sanksi ekonomi, militer dan politik terhadap Rusia sebagai upaya Resolusi Konflik sebagai langkah yang diharapkan dapat berjalan efektif untuk melemahkan kekuatan Rusia.

1.2.2 Pertanyaan Penelitian

Kompleksnya persoalan yang diakibatkan serangan militer Rusia ke Ukraina yang berdampak bagi perekonomian dan politik di Eropa termasuk Inggris menimbulkan pertanyaan penelitian *main problem* ; Bagaimana Diplomasi Koersif Inggris masa pemerintahan Perdana Menteri Boris Johnson terhadap Rusia sebagai upaya Resolusi Konflik Rusia-Ukraina?

1.3 Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengidentifikasi faktor penyebab Inggris melakukan Diplomasi Koersif terhadap Rusia sebagai resolusi konflik Rusia dan Ukraina.
- b. Untuk menjelaskan bagaimana Inggris menjalankan instrumen Diplomasi Koersif Inggris masa pemerintahan Boris Johnson terhadap Rusia melalui berbagai bentuk antara lain secara tekanan secara ekonomi, militer, dan politik.
- c. Menganalisa Diplomasi Koersif Inggris masa pemerintahan Perdana Menteri Boris Johnson terhadap Rusia sebagai upaya Resolusi Konflik antara Rusia dan Ukraina.

1.4 Kegunaan Penelitian

- d. Membuktikan bahwa Diplomasi Koersif benar adanya terjadi dalam dinamika hubungan internasional bukan sekadar konsep.
- e. Memberikan sumbangan pemikiran terhadap dunia penelitian karena dapat menjelaskan secara lebih jelas latar belakang dan tujuan Diplomasi Koersif yang

dilakukan Inggris terhadap Rusia secara lebih komprehensif, jernih, dan teoritis.

- f. Sebagai tugas skripsi penulis dalam memenuhi persyaratan jenjang Strata Satu Program Pendidikan Hubungan Internasional.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian skripsi ini terdiri dari 6 bab. Bab pertama membahas mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan. Pada bab ini akan dijelaskan secara singkat dampak invasi militer Rusia ke Ukraina terhadap Inggris dan negara-negara di Eropa dan gambaran umum mengenai sejarah terjadinya konflik antara Rusia dengan Ukraina.

Bab kedua adalah tinjauan pustaka dan landasan teori dan konsep. Pada bab ini akan dijelaskan teori dan konsep yang digunakan sebagai pisau bedah untuk menganalisa studi kasus ini. Selain itu akan dijelaskan mengenai penelitian-penelitian sebelumnya yang pernah mengkaji topik Resolusi Konflik Rusia-Ukraina sebagai acuan bagi penulis untuk mengisi *gap research* atau kekosongan penelitian.

Bab ketiga ; adalah metodologi penelitian. Pada bab ini akan dijelaskan lengkap dengan kerangka konseptual sebagai acuan bagi penulis dalam mendeskripsikan topik penelitian.

Bab keempat ; adalah pembahasan secara umum mengenai gambaran umum tentang konflik Rusia dan Ukraina. Lalu dirangkai dengan dinamika hubungan diplomatik Inggris dan Rusia dan faktor penyebab mengapa Inggris menempuh Diplomasi Koersif dalam upaya penyelesaian konflik *conflict resolution* antara Rusia dan Ukraina serta karakteristik Diplomasi Koersif Inggris masa pemerintahan Perdana Menteri Boris

Johnson terhadap Rusia.

Bab kelima; diskusi dan hasil pembahasan; Pada bab ini akan dijelaskan gambaran mengenai Analisa kasus dengan menggunakan teori atau konsep yang digunakan dalam penelitian. Di dalam bagian ini akan dibagi beberapa sub-bagian yang akan mempermudah penulis dalam proses analisis data menggunakan teori maupun konsep.

Bab keenam ; sebagai bagian penutup ; akan dijelaskan mengenai jawaban atas pertanyaan pokok penelitian sekaligus kesimpulan serta hasil dari analisa yang telah dilakukan.

